

Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam Melalui Pelatihan Manajemen Kinerja di Sektor Publik

Annisa Fadhilla Ahmad¹, Aeryn Febi Sabrina², Cindy Fatikasari³, Fajar Alfrigo⁴, Farhan Akbar⁵, Hesti Hanifa⁶, Indrianti Saputri⁷, Nurzakiyya⁸, Yulia Ningsih, S.A.P., M.A.P⁹

^{1,2,3,4,5,6,7,8}Administrasi Publik/ Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

⁹Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi

^{*}Corresponding author, nurzakiyya746@gmail.com

Revisi 26/08/2025;
Diterima 28/08/2025;
Publish 31/08/2025

Kata kunci:

Manajemen kinerja,
Aparatur Nagari,
Pelayanan Publik,
Pelatihan, Pengabdian
Kepada Masyarakat

Abstrak

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan Nagari Pasia Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam melalui pelatihan manajemen kinerja di sektor publik. Permasalahan yang diidentifikasi adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur nagari yang berdampak pada kurang optimalnya pelayanan publik. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 19 mei 2025 dengan metode pemberian materi edukatis dan sosialisasi langsung kepada aparatur nagari. Materi yang diberikan meliputi konsep dasar manajemen kinerja, prinsip-prinsip good governance, serta teknik monitoring dan evaluasi kinerja. Hasil kegiatan menunjukkan antusiasme tinggi dari peserta, serta harapan agar pelatihan serupa dapat dilakukan secara berkelanjutan. Kegiatan ini diharapkan agar mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pemerintahan nagari melalui aparatur yang lebih profesional, akuntabel dan kompeten.

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2022 by author (s)



PENDAHULUAN

Pemerintahan Nagari merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan daerah di Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pembangunan masyarakat. Di tengah tuntutan akan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), peningkatan kapasitas aparatur nagari menjadi aspek krusial dalam mendukung efektivitas kinerja lembaga pemerintahan di tingkat lokal.

Namun demikian, masih terdapat kendala yang signifikan di lapangan, khususnya di Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur nagari menghambat optimalisasi manajemen kinerja dan pelayanan publik. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan guna meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan nagari.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan sebagai bentuk kontribusi akademisi dalam mendorong peningkatan kapasitas aparatur nagari melalui pelatihan Manajemen Kinerja di Sektor Publik, yang diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pemerintahan di tingkat nagari.

Analisis Situasi

Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa). Penyelenggara Pemerintah Nagari merupakan subsistem dari penyelenggara pemerintahan, sehingga nagari memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya (Widjaja, 2013). Pemerintahan Nagari Pasia berlokasi di kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Penyelenggaraan Pemerintah Nagari Pasia dalam upaya meningkatkan kapasitas aparturnya melalui pelatihan Manajemen Kinerja di Sektor Publik, dalam tahap berusaha memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat di daerah Nagari Pasia, dengan mengembangkan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengelolaan manajemen kinerja di sektor publik. Oleh karena itu, prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 adalah untuk menangani urusan pemerintahan yang didasarkan oleh tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata, serta benar-benar sesuai dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional (Faridah dan Suryono, 2015).

Rendahnya, kualitas kapasitas aparatur nagari menjadi kendala tersendiri dalam kerangka pengelolaan manajemen kinerja di sektor publik, sehingga menimbulkan masalah yang menjadikan kelemahan dalam pembangunan nagari. Lemahnya kualitas aparatur lembaga pelayanan publik dalam tatanan pemerintah daerah terutama di tingkat Pemerintah Nagari juga diungkapkan oleh Makmur (2008 :6) sebagaimana berikut: Kualitas SDM di Indonesia tidak hanya terjadi di lingkungan masyarakat bawah, tetapi juga di lingkungan birokrasi pemerintahan mulai birokrasi pusat hingga birokrasi pemerintah desa. Rendahnya kualitas

SDM birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak kepada kualitas kerja para birokrat yang rendah yang bermuara kepada kesengsaraan rakyat secara ekonomi, politik, sosial, keamanan, dan ketertiban karena tidak mendapatkan pelayanan terbaik dari aparat birokrasi. Rendahnya kualitas kerja birokrasi pemerintahan telah memberikan dampak secara langsung maupun tidak langsung kepada tidak tercapainya tujuan dan sasaran organisasi pemerintahan mulai dari pusat, provinsi, kabupaten hingga ke pemerintahan desa, inilah kualitas SDM sangat rendah.

Berdasarkan permasalahan di atas, peningkatan kualitas kapasitas aparatur pemerintahan perlu mendapat perhatian serius guna memperlancar tercapainya tujuan organisasi. Peran aparatur nagari Pasia, Kec. Ampek Angkek, Kabupaten Agam sangat penting dalam pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pelatihan manajemen kinerja di sektor publik dan meningkatkan aparatur nagari.

Solusi dan Target

1. Solusi yang Ditawarkan

Manajemen kinerja dalam sebuah kegiatan atau pemerintahan sangat dibutuhkan, kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi yang tertuang dalam perumusan perencanaan strategis. Kinerja aparatur nagari memiliki keterkaitan yang sangat erat karena tercapainya tujuan organisasi tidak lepas dari sumber daya yang dimiliki. Pemerintahan dijalankan oleh aparatur nagari yang berperan aktif sebagai pelaku dalam upaya mencapai suatu tujuan.

Muara dari semua aspek peningkatan kapasitas pemerintahan nagari adalah peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakatnya. Cermatan dari keberadaan pemerintah nagari adalah pelayanan kepada masyarakat, artinya jika pemerintahan nagarnya memiliki kapasitas yang bagus maka kualitas pelayanan juga diharapkan baik. Dengan memperhatikan permasalahan-permasalahan manajemen pelayanan saat ini, berbagai aspek masih perlu ditingkatkan seperti aspek sumber daya manusia aparat desa/nagari, aspek keuangan, dan lain-lain maka kualitas pelayanan masyarakat nagari perlu ditingkatkan

Peningkatan kualitas aparatur pemerintah sebagai wujud terciptanya pelayanan maksimal kepada masyarakat, juga termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun

2000 tentang “Pendidikan, Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil”, dimana prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

1. **Profesionalitas**, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
2. **Akuntabilitas**, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.
3. **Transparansi**, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
4. **Pelayanan prima**, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
5. **Demokrasi dan Partisipasi**, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
6. **Efisiensi dan Efektifitas**, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
7. **Supremasi hukum** dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2. Rencana Target Capaian Luaran

Target upaya mengatasi Kondisi Penghambat Kinerja Pemerintahan Nagari dalam Meningkatkan Kualitas Aparatur Nagari yaitu:

- a. Pengawasan Terhadap Perubahan manajemen kinerja di Aparatur Nagari:
 - 1) Meningkatkan kerja sama dengan pihak kecamatan dalam proses crosscheck data rekomendasi perangkat desa yang akan diberhentikan
 - 2) Melaksanakan peraturan daerah yang mengatur tentang penangkatan dan pemberhentian perangkat desa dengan pengelolaan manajemen kinerja sebagai salah satu pihak yang memiliki peran langsung dalam pelayanan desa tingkat kabupaten.
- b. Meningkatkan Kualitas Pendidikan dan Keterampilan Sumber Daya Aparatur Nagari

- 1) Mengikut sertakan aparat nagari untuk pendidikan dan pelatihan formal manajemen kinerja sektor publik. Serta melaksanakan bimbingan dan pelatihan bagi personil manajemen kinerja tentang berbagai Peraturan Daerah maupun pengaplikasian Aplikasi yang berhubungan dengan Pemerintahan Nagari. Dengan kegiatan ini diharapkan pengetahuan dan keterampilan serta sikap dan mentalitas aparat menjadi lebih baik. Sehingga menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas.
 - 2) Peningkatan semangat kerja melalui rotasi jabatan di lingkungan Kantor Aparatur Nagari khususnya bagi staf antar Bidang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan motivasi dan kesegaran personil sehingga tidak memiliki rasa jenuh. Selain itu untuk menghindari kesalahpahaman diantara anggota aparat nagari.
- c. Menambah Sarana Dan Prasarana Untuk Menunjang Penyelenggaraan Peningkatan Kualitas Nagari.
- 1) Memberikan permohonan kepada Bupati agar dapat memberikan tambahan sarana dan prasarana sebagai salah satu penunjang tugas dan fungsi, dengan ketentuan seperti penambahan kendaraan, sarana Gedung kantor yang lebih luas dan pemeliharaan rutin.
 - 2) Merawat dan memelihara sarana yang ada dan melakukan perbaikan terhadap Gedung kantor, kendaraan dinas dan operasional lainnya.
- d. Memberikan Pembinaan Khusus Kepada Masyarakat Desa Mengenai Politik dan Budaya
- 1) Mempertegas kembali sanksi dan pembinaan bagi para pelaku pelanggaran politik tersebut bisa dengan cara menyurati langsung atau dengan langsung mendatangi langsung kelapangan, sehingga diharapkan para pelaku pelanggar peraturan politik mendapatkan efek jera dari perbuatannya dan tidak melakukan kembali pelanggaran yang dilakukan.
 - 2) Melakukan penyuluhan terhadap masyarakat desa terkait dengan masalah budaya agar menyesuaikan perkembangan zaman sehingga dapat bersaing dengan masyarakat lainnya.

METODE PELAKSANAAN

Tempat dan Waktu

1. Waktu : 19 Mei 2025
2. Tempat Pelaksanaan : Kantor Wali Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam.

Khalayak Sasaran

Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah:

1. Aparatur Nagari Pasia, termasuk staf dan pejabat struktural yang terlibat langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelayanan publik di tingkat nagari.
2. Perangkat pendukung yang terlibat dalam proses tata kelola pemerintahan nagari, seperti sekretariat, kepala urusan dan kepala jorong

Metode Pengabdian

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan:

1. Pemberian materi edukasi mengenai Manajemen Kinerja di Sektor Publik
2. Kegiatan Sosialisasi kepada masyarakat Nagari Pasia.

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dapat dilihat dari beberapa aspek. Pertama, tingginya partisipasi aparatur Nagari Pasia dalam kegiatan pelatihan menjadi tanda bahwa kegiatan ini mendapat sambutan positif dan relevan dengan kebutuhan mereka. Kedua, para peserta terlihat antusias dan aktif selama pelatihan berlangsung, yang ditunjukkan melalui keterlibatan dalam sesi diskusi dan tanya jawab. Ketiga, pemahaman aparatur terhadap materi yang disampaikan seperti pentingnya manajemen kinerja di sektor publik dan prinsip-prinsip good governance meningkat, yang diharapkan berdampak pada perbaikan kinerja mereka dalam menjalankan tugas pelayanan publik. Selain itu, kegiatan ini juga dinilai berhasil karena menghasilkan dokumentasi kegiatan. Harapan dari peserta agar pelatihan semacam ini terus berlanjut di masa depan juga menjadi salah satu tolak ukur bahwa kegiatan ini dianggap bermanfaat dan perlu diteruskan.

Metode Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini akan dilakukan secara komprehensif untuk mengetahui bagaimana peran aparatur Nagari Pasia dalam manajemen kinerja di sektor publik dan apa saja upaya peningkatan kapasitas aparatur Nagari

Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Sehingga bisa meningkatkan kualitas kapasitas aparatur dan meningkatkan kualitas Pendidikan dan keterampilan sumber daya aparatur di Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat melalui pelatihan manajemen kinerja di sektor publik dan meningkatkan aparatur nagari.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan tema “Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari Melalui Pelatihan Manajemen Kinerja Di Sektor Publik” telah dilaksanakan pada tanggal 19 Mei 2025, bertempat di Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Kegiatan ini dimulai pada pukul 10.00 WIB dan berlangsung hingga selesai dengan melibatkan perangkat nagari sebagai peserta. Kegiatan diawali dengan pembukaan oleh Ketua Tim Pelaksana, dilanjutkan sambutan dari perwakilan perangkat nagari. Setelah itu, tim pengabdian memberikan materi edukatif mengenai manajemen kinerja disektor publik. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif melalui diskusi dan tanya jawab. Materi yang diberikan dalam kegiatan ini meliputi:

1. Pengertian dan pentingnya manajemen kinerja di sektor publik
2. Peran strategis aparatur nagari dalam pelayanan public
3. Prinsip-prinsip good gevernance: profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan partisipasi.
4. Teknik monitoring dan evaluasi kinerja aparatur.

KESIMPULAN

Melalui Kegiatan Pengabdian Masyarakat para aparatur nagari memberikan respon terhadap kegiatan sangat positif. Aparatur nagari menunjukkan antusias tinggi dalam memahami konsep dan praktik manajemen kinerja. Selain itu, mereka juga menyampaikan harapan agar kegiatan pelatihan seperti ini dapat berlanjut secara berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Sinuhaji, Andy Sofian.(2019). "Peranan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Upaya Meningkatkan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan belanja Desa di Kabupaten Karo."

Daerah-Lembaga, P. K. K. O., Nasional, P., Terbitan, K. D., & PKKOD-LAN, T. Peningkatan Kapasitas Pemerintahan Desa.

RAHMAYANI, R., & MISBACH, I. (2020). MANAJEMEN KINERJA APARATUR DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN DI DESA TAENG KECAMATAN PALLANGGA KABUPATEN GOWA. Washiyah: Jurnal Kajian Dakwah dan Komunikasi, 1(3).

Prasetyo, A. (2022). KINERJA APARATUR DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PENINGKATAN KUALITAS APARATUR DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA (Doctoral dissertation, IPDN).